



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMBENAHAN TATA KELOLA SEKTOR MIGAS

T. Ade Surya
Analisis Legislatif Ahli Madya
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Sebagai sumber daya yang sangat strategis, sektor ini berperan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, selama bertahun-tahun tata kelola sektor ini kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketergantungan pada impor minyak mentah, praktik tidak transparan, hingga dugaan adanya mafia migas yang merugikan negara. Dalam 1–2 minggu terakhir, isu pembenahan tata kelola sektor migas kembali menjadi sorotan setelah adanya pengungkapan kasus pelanggaran hukum dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero)/Pertamina. Kasus tersebut terkait dugaan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak mentah produksi dalam negeri pada periode 2018–2023, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp193,7 triliun untuk tahun 2023 saja. Kasus ini menjadi isu nasional dan dengan cepat menggerus kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis yang menjalankan fungsi vital dalam pengelolaan migas.

Dalam upaya membenahi tata kelola migas dan mengembalikan kepercayaan publik, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa Pertamina akan melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam produksi serta perdagangan migas, bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertamina juga telah membentuk *crisis center team* untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis yang berjalan selama ini, terutama dari aspek operasional. Pertamina berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan minyak mentah yang diproduksi dari dalam negeri dan berupaya mengurangi ekspor dengan memprioritaskan pengolahan di dalam negeri. Sementara untuk kebutuhan impor yang masih harus dipenuhi akan dilakukan evaluasi tata kelola produksi dan perdagangannya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi 600.000 barel minyak mentah per hari, dengan 400.000 barel per hari berasal dari Pertamina. Adapun kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1,6 juta barel per hari sehingga Pertamina masih harus mengimpor kekurangannya. Dalam upaya mengurangi ketergantungan ini, Pertamina berencana untuk bernegosiasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar lebih banyak minyak mentah yang dapat diolah di dalam negeri daripada diekspor ke luar negeri.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Kementerian ESDM telah menerapkan perubahan dalam mekanisme izin impor bahan bakar minyak (BBM), dari izin tahunan menjadi izin per enam bulan, untuk memungkinkan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan migas. Selain itu, untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri, pemerintah juga mendorong pembangunan kilang baru. Menteri ESDM menegaskan pentingnya investasi untuk membangun infrastruktur penyimpanan dan kilang

BBM yang lebih besar guna meningkatkan cadangan minyak domestik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menutup keran ekspor minyak mentah agar produksi dalam negeri dapat sepenuhnya diolah di Indonesia.

Pembenahan tata kelola sektor migas sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan upaya mencapai swasembada energi. Kasus pelanggaran hukum dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang perlu dijadikan momentum oleh Pertamina untuk memperbaiki kinerja dari hulu hingga hilir. Melalui peningkatan efisiensi dan transparansi, penegakan hukum, serta pengembangan infrastruktur, diharapkan sektor migas dapat dikelola dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat. Namun demikian, tantangan besar masih harus dihadapi untuk memastikan bahwa reformasi ini dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Terungkapnya kasus pelanggaran hukum dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina, menjadi catatan buruk dalam pengelolaan sektor migas nasional. Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap Pertamina. Atas kejadian ini, dalam upaya membenahi tata kelola migas dan mengembalikan kepercayaan publik, Pertamina sebagai induk perusahaan akan melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam produksi serta perdagangan migas. Komisi XII DPR RI perlu memberikan atensi serius terhadap permasalahan ini. Komisi XII DPR RI perlu mendukung sekaligus mengawasi upaya Pertamina dalam membenahi tata kelola migas. Evaluasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir harus dilakukan oleh Pertamina, termasuk juga oleh Kementerian ESDM. Komisi XII DPR RI juga perlu meminta Pertamina untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya sebagai BUMN strategis yang menjalankan fungsi vital dalam pengelolaan migas.

Sumber

Bisnis Indonesia, 4 Maret 2025;
Kompas, 4 dan 6 Maret 2025;
kompas.id, 3 Maret 2025; dan
tempo.co, 3 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making